



Dukung Transparansi Dana Desa

SINTANG-Koordinator Wilayah Laskar Anti Korupsi Indonesia Kapuas Raya, Abang Damsik sangat mendukung langkah pemerintah yang senantiasa mendorong transparansi penggunaan dana desa. Pengawasan harus dilakukan instansi terkait supaya penggunaan Dana Desa bisa menjadi

tepat sasaran.

Menurut Damsik, pemerintah diingatkan supaya juga konsisten. Tidak sebatas mengimbuai penggunaan dana desa transparan. Pendampingan pengelolaannya juga mesti berjalan. Misal dalam proses perancangan APBDes. Begitu pula dengan pelaporan yang harus mengikuti sistim akuntansi negara. "Instansi terkait idealnya memberi bimbingan," katanya.

Ia menambahkan aparat desa mesti mampu membuat pelaporan

sesuai akuntansi negara. Tuntutan atas penggunaan uang negara. Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bisa menyimpulkan temuan bila laporan tidak standar. Selain dari penggunaan dana jika tidak tepat sasaran. "Artinya, perangkat desa tidak boleh dibiarkan sendirian. Kemampuan membuat laporan standar akuntansi negara harus diberikan," kata Damsik.

Sementara berkenaan dorongan pemerintah supaya penggunaan Dana Desa ditampilkan ke umum, Damsik menilai hal positif. Sehingga masyarakat bisa mengetahui alokasi dana

◆ Ke Halaman 26 kolom 1



Dukung Transparansi Dana Desa

sambungan dari halaman 28

untuk membangun kemajuan desa. Dana digunakan sesuai perencanaan atau tidak. Kemudian kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi juga menjadi penting. Hanya saja, menurut Damsik, pemerintah idealnya tidak hanya mendorong transparansi ke pemerintah desa. Namun pemerintah secara menyeluruh juga bisa transparan dalam

pengelolaan uang negara.

Ia mengatakan bila transparansi berjalan peluang korupsi akan mengecil. Banyak pihak bisa melakukan kontrol. Karena itu, Damsik sangat mengapresiasi terhadap pemerintah desa maupun pemerintah daerah yang bisa transparan menampilkan penggunaan anggaran. Sehingga masyarakat bisa menjadi tahu kalau kebijakan yang berjalan sesuai kebutuhan

atau tidak.

Ia menambahkan khusus untuk penggunaan dana desa idealnya jangan sampai terjadi penyimpangan. Pasalnya kini konsepnya adalah desa membangun. Bukan lagi membangun desa. Sehingga dananya bila tidak tepat sasaran, program pemerintah menjadi percuma. Target yang ingin dicapai menjadi sulit terlaksana. Padahal dana desa merupakan peluang masyarakat

membangun desanya secara mandiri.

Karena itu, menurut Damsik, sangat disayangkan bila sampai timbul kasus penyelewengan dana desa. Karena, pihak yang terlibat bakal tersandung hukum. Pasalnya, dana desa merupakan uang negara. "Pertanggungjawabannya berhadapan dengan hukum kalau sampai terjadi penyimpangan," katanya. (stm)